



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Rabu

Tanggal: 22 Februari 2017

Halaman: 2

PANWAS JUNJUNG TINGGI PROFESIONALITAS
Tak Terbukti, Laporan PNS Diserahkan
ke Pj Walikota

YOGYA (KR) - Laporan dugaan ketidaknetralan PNS yang dilaikan ke Panwas Kota Yogyakarta pada 13 Februari 2017 lalu, berhasil diputuskan. Dari unsur dugaan pelanggaran pidana pemilu ternyata tidak terbukti, sehingga direkomendasikan untuk diserahkan ke Penjabat (Pj) Walikota terkait dugaan pelanggaran administratif.

Keputusan Panwas Kota Yogyakarta tersebut dipaparkan saat sejumlah elemen dari Forum Pengawal Demokrasi Indonesia mendatangi sekretariat Panwas Kota Yogyakarta di Jalan Suryopranoto Gunungketur Pakulaman, Selasa (21/2).

"Kami sudah bahas bersama di Sentra Gakkumdu. Pemenuhan unsur pidana pemilu tidak terpenuhi, sehingga tidak bisa ditindaklanjuti ke penyidikan. Tapi untuk dugaan pelanggaran administratif, kami serahkan ke Pj Walikota maupun Inspektorat," ungkap Komisiner Panwas Kota Yogyakarta Divisi Pendidikan, Pikeska Hiranurpika.

PNS yang dilaporkan ke Panwas Kota Yogyakarta tersebut ialah Pjt Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Yunianto Dwisutono. Yang bersangkutan dipermasalahkan karena dianggap tidak netral lantaran unggahannya di aplikasi sosial *whatsapp* yang dinilai bentuk kampanye.

Pikeska menambahkan, unsur pidana pemilu yang tidak terbukti tersebut meliputi barang bukti. Hal ini karena postingan Yunianto ke grup UPT Malioboro dalam aplikasi *whatsapp*, tidak hanya satu paslon melainkan keduanya.

"Kalau unsur pidana pemilu memang tidak terbukti, tapi terkait hal-hal yang menyangkut administratif maka instansi di Pemkot lah yang lebih mengetahui karena ada undang-undang sendiri yang mengaturnya, urainya."

Sedangkan Ketua Panwas Kota Yogyakarta, Agus Muhammad Yasin, memastikan seluruh aduan yang dilaikan ke Panwas akan ditindaklanjuti. Pihaknya menjunjung tinggi profesionalitas serta melandaskan pada peraturan perundangan.

Selain itu, keputusan Panwas sama sekali tidak terpengaruh dengan paksaan atau tindakan lain yang mengandung intimidasi.

Koordinator Forum Pengawal Demokrasi Indonesia, Fokki Ardiyanto, mengaku pihaknya belum sepenuhnya puas atas keputusan Panwas. Namun ia tetap menghargai lantaran ketugasannya sudah sesuai dengan mekanisme.

"Kami akan meminta salinan keputusan dari laporan itu. Kemudian kami juga akan mengkaji apakah Pilwali ini dilakukan atas keadilan dan kejujuran atau tidak," ungkapnya.

Dikonfirmasi terpisah, Penjabat Walikota Yogyakarta Sulistyo memastikan tidak akan melindungi bawahannya yang terbukti melanggar hukum. Namun pihaknya perlu mendalami laporan dari Panwas serta menyandingkan dengan regulasi terkait disiplin PNS.

Begini rekomendasi dari Panwas sudah kami terima, nanti akan kami lihat dulu bentuk pelanggaran apa, melanggar pasal apa saja. Jika terbukti melanggar ya kita jatuhkan sanksi sesuai aturan perundangan," tandasnya. (Dhi-m)

Tindak Lanjut

- ☐ Untuk Ditanggapi
- ☒ Untuk Diketahui
- ☐ Jumpa Pers

Jajaran Panwas Kota Yogyakarta memaparkan hasil penindakan laporan dugaan PNS tidak netral.

KR-Ardhi Wahdan

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			
3. BKPP			

Yogyakarta, 06 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005